

BAB II

GAMBARAN UMUM

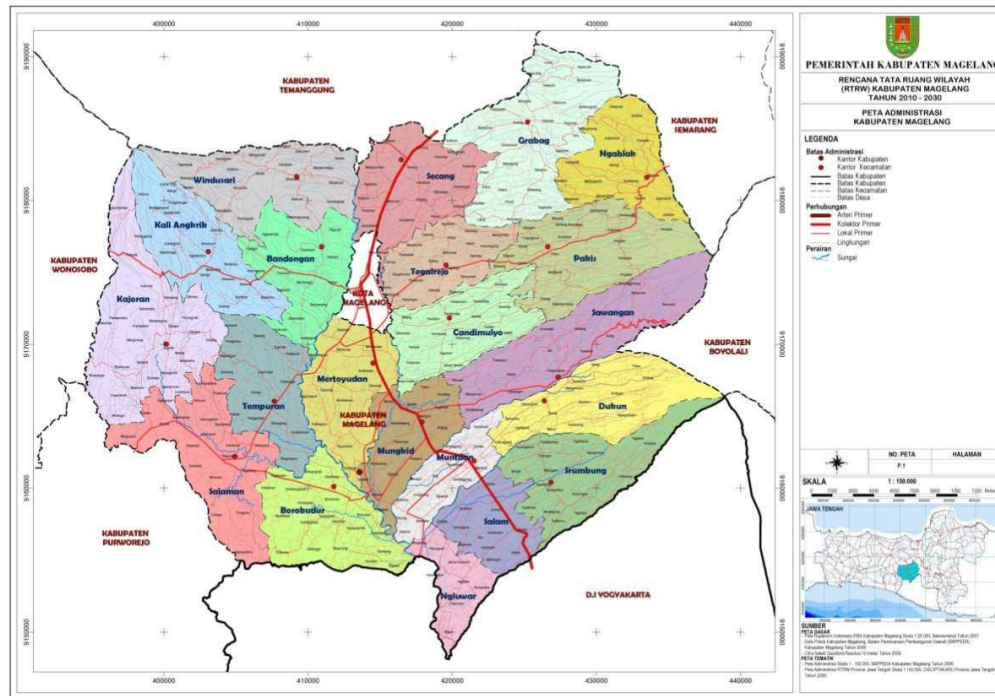
2.1 Kabupaten Magelang

Kabupaten Magelang merupakan salah satu kabupaten yang berada di Provinsi Jawa Tengah. Kabupaten memiliki ibukota kabupaten yakni Kota Mungkid. Secara geografis Kabupaten Magelang terletak pada posisi 110001'51" dan 110026'58" Bujur Timur dan antara 7019'13" dan 7042'16" Lintang Selatan. Wilayah Kabupaten Magelang secara umum merupakan dataran tinggi yang memiliki bentuk seperti cekungan yang dikelilingi beberapa gunung (Merapi, Merbabu, Andong, Telomoyo, Sumbing) dan pegunungan Menoreh. Dua sungai besar mengalir di tengahnya, Sungai Progo dan Sungai Elo, dengan beberapa cabang anak sungai yang bermata air di lereng gunung-gunung tersebut. Topografi datar 8.599 Ha, bergelombang 44.784 Ha, curam 41.037 Ha dan sangat curam 14.155 Ha. Ketinggian wilayah antara 153-3.065 m diatas permukaan laut. Ketinggian rata-rata 360 m diatas permukaan laut. Batas Wilayah Kabupaten Magelang

Utara	: Kab. Temanggung dan Kab. Semarang
Selatan	: Kab. Purworejo dan Propinsi DIY
Barat	: Kab. Temanggung dan kab. Wonosobo
Timur	: Kab. Boyolali dan Kab. Semarang

Gambar 2.1

Peta Administrasi Kabupaten Magelang



Sumber : Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2011 tentang RTRW Kabupaten Magelang

Secara administratif, Kabupaten Magelang terbagi menjadi 21 kecamatan dan terdiri dari 372 desa/kelurahan dengan jumlah penduduk Kabupaten Magelang yang bersumber dari data Kabupaten Magelang Dalam Angka Tahun 2013, adalah 1.080.500 jiwa yang terdiri dari 535.142 jiwa laki laki dan 545.358 jiwa perempuan.

Pada sektor kehutanan, hutan negara yang berada di Kabupaten Magelang seluas 7.073 Ha atau 6,5% dari seluruh wilayah. Hutan ini termasuk hutan produksi, yang sangat baik sebagai kawasan lindung atau penyangga. Hasil dari produksi hutan

tersebut berupa kayu maupun madu lebah. Selain itu, di Kabupaten Magelang sektor perkebunan dikembangkan menjadi konsep agroforestrasi dengan tanaman panen produktif sesuai wilayah kecamatan masing-masing. Misalnya dengan kondisi penurunan kualitas air pada perbukitan yang gundul dan rawan erosi cocok untuk ditanami pepohonan yang berakar kuat serta berbuah banyak. Pohon tadi juga dapat dipanen secara periodik. Sedangkan pada kondisi geografis yang sering terjadi kemarau ditanami dengan tanaman yang tidak terlalu membutuhkan air seperti pohon jati. Hasil perkebunan di kabupaten Magelang mencakup padi, ubi jalar, kacang tanah, vanili, kapuk, tebu, cengkeh, kopi dan tembakau.

2.2 Perhutani Divisi Regional Jawa Tengah

Perum Perhutani merupakan Badan Usaha Milik Negara berbentuk Perusahaan Umum (Perum) yang menaungi bidang Kehutanan yang mempunyai tugas dan wewenang untuk menyelenggarakan kegiatan pengelolaan Sumber Daya Hutan di Jawa dan Madura dengan memperhatikan 3 aspek yakni aspek produksi/ekonomi, aspek sosial dan aspek lingkungan. Perum Perhutani berada di bawah naungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, didirikan berdasarkan PP No. 15 Tahun 1972 tentang Pendirian Perusahaan Umum Kehutanan Negara dengan Kawasan Unit I Jawa Tengah dan Unit II Jawa Timur. Berdasarkan PP No. 2 Tahun 1978, wilayah kerja tersebut diperluas dengan Unit III Jawa Barat. Selanjutnya pendirian Perum Perhutani disesuaikan berdasarkan PP No. 36 Tahun 1986 dan terakhir diatur oleh PP. No.30 Tahun 2003 tanggal 11 Juni 2003.

Perum Perhutani dalam menjalankan tugas fungsi dan wewenangnya berkoordinasi dengan Kementerian BUMN dan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Maksud dan tujuan berdirinya Perum Perhutani adalah menyelenggarakan usaha di bidang kehutanan yang berupa barang dan jasa yang berkualitas dan memadai bagi pemenuhan hajat hidup orang banyak serta turut aktif melaksanakan dan menunjang pelaksanaan kebijaksanaan dan program pemerintah di bidang ekonomi dan pembangunan pada umumnya. Peran strategis Perhutani adalah mendukung kelestarian lingkungan, sistem sosial budaya, dan sistem perekonomian masyarakat hutan. Perum Perhutani dikelompokkan dalam 6 satuan unit organisasi, yaitu :

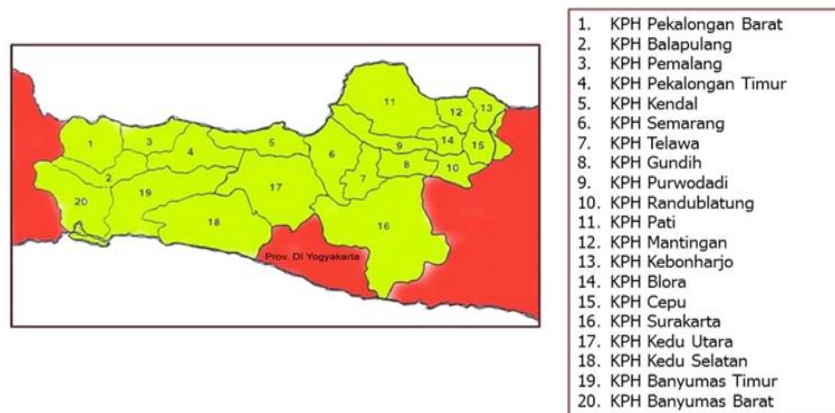
1. Kantor Pusat yang berkedudukan di Jakarta
2. Kantor Unit yang terdiri atas :
 - a. Divisi Regional Jawa Barat yang berada di Bandung
 - b. Divisi Regional Jawa Tengah yang berada di Semarang
 - c. Divisi Regional Jawa Timur yang berada di Surabaya
3. Pusat Pendidikan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia yang berada di Madiun.
4. Pusat Penelitian dan Pengembangan Perhutani yang berada di Cepu.
5. Kesatuan Bisnis Mandiri (KBM) beserta organisasi di bawahnya berkedudukan di masing-masing wilayah unit dengan mempertimbangkan faktor efisiensi, efektifitas dan strategi pembentukannya yang akan ditetapkan.

6. Kesatuan Pengangkatan Hutan (KPH) beserta organisasi dibawahnya berkedudukan dimasing-masing wilayah KPH, atau wilayah yang berdekatan dengan wilayah KPH.

Pada lingkup Provinsi Jawa Tengah, Perum Perhutani Divisi Regional Jawa Tengah terbentuk pada tahun 1972, lokasi perusahaan ini terletak di Gedung Bank BHS Jalan Pandanaran Semarang. Kemudian sejak awal tahun 1994 sampai sekarang, kantor Perum Perhutani Divisi Regional Jawa Tengah bertempat di Jalan Pahlawan No. 15-17 Semarang. Perum Perhutani mempunyai kawasan hutan seluas 2.446.907,27 Ha yang terdiri dari hutan lindung (tidak termasuk kawasan hutan suaka alam), hutan produksi dan hutan wisata. Untuk Divisi Regional Jawa Tengah sendiri memiliki wilayah kerja lahan hutan seluas 635.746,78 Ha terbagi pada 20 Kesatuan Pemangkuan Hutan (KPH).

Gambar 2.2

Wilayah Kerja Perum Perhutani Divisi Regional Jawa Tengah



Sumber : Perum Perhutani Divre Jawa Tengah

Visi, Misi dan Tata Nilai Perum Perhutani Divisi Regional Jawa Tengah

1. Visi

Menjadi Perusahaan Unggul dalam Pengelolaan Hutan Lestari

2. Misi

- a) Mengelola Sumberdaya Hutan secara Lestari (*Planet*).
- b) Meningkatkan Manfaat Pengelolaan Sumberdaya Hutan bagi Seluruh Pemangku Kepentingan (*People*).
- c) Menyelenggarakan Bisnis Kehutanan dengan Prinsip *Good Corporate Governance* (*Profit*).

3. Tata Nilai

- a) **Jujur** : Bertindak secara konsisten sesuai dengan nilai-nilai, kebijakan dan kode etik organisasi.
- b) **Peduli** : Tanggap dan mau terlibat dalam menyelesaikan permasalahan perusahaan, karyawan dan masyarakat.
- c) **Professional** : Menghasilkan kinerja yang terbaik dan selalu meningkatkan kompetensi sesuai permasalahan lingkungan bisnis.

2.3 Perum Perhutani KPH Kedu Utara

Perum Perhutani Kesatuan Pemangkuan Hutan (KPH) Kedu Utara adalah salah satu manajemen Perum Perhutani di wilayah Divisi Regional Jawa Tengah. Luas wilayah

kerja Perum Perhutani KPH Kedu Utara adalah 36.343,39 Ha yang tersebar pada kawasan hutan di beberapa kabupaten, yakni :

- Kabupaten Kendal seluas 5.095,13 Ha
- Kabupaten Magelang 5.276,95 Ha
- Kabupaten Semarang seluas 2.537,92 Ha
- Kabupaten Temanggung seluas 13.504,93 Ha
- Kabupaten Wonosobo seluas 9.928,46 Ha

KPH Kedu Utara terbagi dalam dua kelas perusahaan (KP) Pinus seluas 25.069,00 Ha dan KP Mahoni seluas 11.274,39 Ha. Berdasarkan fungsi kawasan hutan, KPH Kedu Utara terbagi untuk Hutan Produksi Terbatas (HPT) > 15 % seluas 10.959,22 Ha, Hutan Produksi (HP) seluas 12.781,64 Ha dan Hutan Lindung (HL) seluas 12.602,53. KPH Kedu Utara secara geografis terletak di antara 2°55" sd 3°45" BT dan 7°00" sd 7°42" LS dan berbatasan :

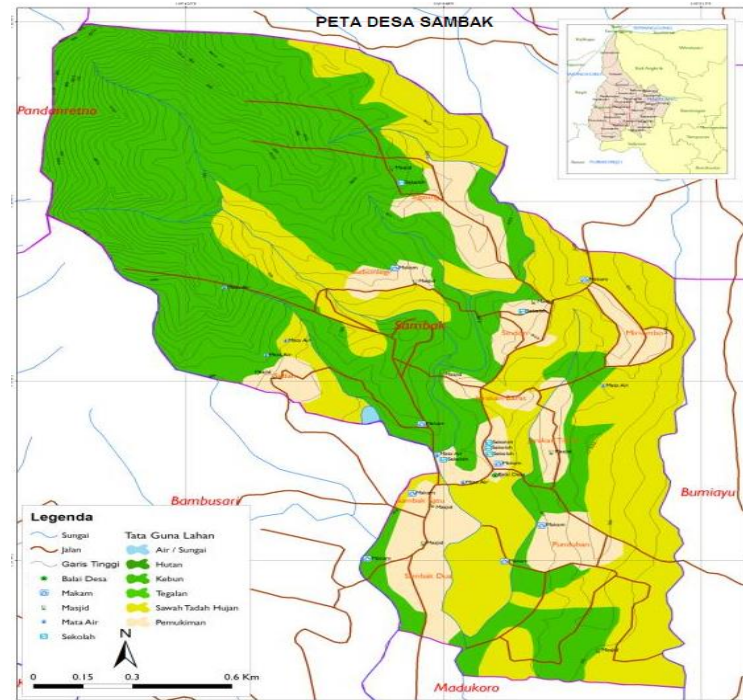
- Bagian Utara : Berbatasan dengan wilayah kerja KPH Kendal
- Bagian Timur : Berbatasan dengan wilayah kerja KPH Kendal dan KPH Surakarta
- Bagian Selatan : Berbatasan dengan wilayah kerja KPH Kedu Selatan dan PHW II Yogyakarta
- Bagian Barat : Berbatasan dengan wilayah kerja KPH Banyumas Timur

Tipe iklim KPH Kedu Utara merupakan tipe iklim C menurut Schmidt Ferguson dengan bulan basah tertinggi di bulan Agustus dan bulan basah terendah di bulan April. Pengelolaan Kawasan Hutan KPH Kedu Utara di bagi ke dalam 5 Bagian Kesatuan Pemangkuan Hutan (BKPH) yaitu BKPH Ambarawa, BKPH Magelang, BKPH Temanggung, BKPH Candiroto, BKPH Wonosobo dengan 21 Resort Pemangkuan Hutan (RPH). KPH Kedu Utara dengan luas wilayah 36.353,39 Ha dikelilingi oleh 275 desa yang terdiri dari 64 desa di wilayah BKPH Magelang Kabupaten Magelang, 41 desa di wilayah BKPH Ambarawa Kabupaten Semarang dan Magelang, 66 desa di wilayah BKPH Candiroto Kabupaten Temanggung dan Kabupaten Kendal, 64 Desa di wilayah BKPH Wonosobo kabupaten Wonosobo dan 38 Desa di wilayah BKPH Temanggung Kabupaten Temanggung.

2.4 Desa Sambak

Desa Sambak merupakan salah satu desa yang berada di Kecamatan Kajoran Kabupaten Magelang Jawa Tengah. Desa Sambak berbatasan langsung dengan Desa Mangunrejo di sebelah utara, Desa Madukoro di sebelah selatan , Desa Bambusari di sebelah barat dan Desa Bumiayu di sebelah selatan. Desa Sambak terdiri atas 10 dusun yakni Dusun Sambak I, Sambak II, Sedahan, Kebon Legi, Sigaung, Miriombo, Sindon Punduhan, Jarakan Barat dan Jarakan Timur. Desa Sambak memiliki wilayah seluas 334,5 Ha dengan 132 ha berupa lahan persawahan, 43,5 kebun campur, tegal seluas 66,6 ha dan hutan rakyat seluas 110 ha serta hutan negara wengkon desa seluas 80 ha kemiringan < 30% (Pemerintah Desa Sambak, 2016)

Gambar 2.4
PETA DESA SAMBAK



Sumber : Pemerintah Desa Sambak Kabupaten Magelang

Desa Sambak merupakan daerah dengan area Pegunungan tepatnya lereng gunung Sumbing yang memiliki ketinggian antara 438 – 750 m diatas permukaan laut (MDPL). Dengan ketinggian tersebut, suhu di Desa Sambak menjadi cukup dingin dengan suhu 21–320 C dengan curah hujan rata-rata per tahun sebesar 2000 mm. Cuaca di kawasan ini tergolong sejuk. Desa Sambak dilewati aliran sungai Tangsi yang merupakan subdaerah aliran sungai (Sub-DAS) Progo. Karakteristik tanah pada wilayah Sambak sebagian besar adalah tanah Andisol. Tanah Andisol terbentuk pada iklim yang beraneka ragam dengan batuan induk Vulkanik. Sifat tanah Andisol adalah

bersolum tebal/dalam dan berwarna kuning terang, makin dalam makin terang. Tekstur Liatnya Silty loam dengan kadar liat kurang dari 30%. Kepekaan tanah Andisol terhadap erosi cukup tinggi, keasamannya bermacam-macam, dan bahan organiknya rendah.

Visi, Misi dan Lembaga Desa

a. Visi

“Mewujudkan desa agro wana wisata untuk kemandirian dan kesejahteraan.”

Visi di atas mengandung makna bahwa Pemerintah Desa Sambak mendukung adanya Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat agar dapat mewujudkan desa yang mandiri dan sejahtera.

b. Misi

- 1) Meningkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan yang Mahaesa;
- 2) Menggali potensi sumber daya alam botani maupun hayati untuk mengembangkan pendidikan / pengetahuan masyarakat luas baik formal maupun nonformal;
- 3) Memberdayakan seluruh lapisan masyarakat dalam menggali, mengembangkan dan mengelola sumber daya yang dimiliki desa.
- 4) Menciptakan kondisi tertib, antan, demokratis berlandaskan hukum yang berlaku dengan asas kebenaran dan keadilan;

- 5) Menjalinkan kemitraan dengan pihak lain;
- 6) Meningkatkan kemandirian dan pemerataan dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan yang demokratis, partisipatif dan akuntabilitas;
- 7) Meningkatkan pelayanan umum;
- 8) Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat;
- 9) Mengembangkan ekonomi dengan potensi lokal;
- 10) Menjaga kelestarian dan menumbuhkembangkan budaya dan seni lokal.

Tabel 2.1
Lembaga di Desa Sambak

No	Jenis	Nama Lembaga	Anggota
1	Kemasyarakatan (Umum)	<ol style="list-style-type: none"> 1. LPMD 2. PKK 3. LPP Forum 4. PKBM 5. LMDH 6. KIM 7. PKD 8. Sanggar Omah Ngisor 	4 orang 100 Kader 50 orang pemuda
2	Ekonomi	<ol style="list-style-type: none"> 1. LKM 2. LUMBUNG 3. Gapoktan 	1 LKM 4 lumbung Desa 500 orang
3	Budaya, Adat, dan Agama	<ol style="list-style-type: none"> 1. NU 2. Muhammadiyah 3. Kesenian Tradisional 4. Kesenian Religi 	1000 orang 700 orang 5 Kelompok 7 Kelompok
4	Keamanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Poskamling 2. Linmas 3. Babinkamtibmas 4. Babinsa 	20 Pos 100 orang 1 orang 1 orang

Sumber : Pemerintah Desa Sambak

2.5 Lembaga Masyarakat Desa Hutan Wana Hijau Lestari

Awal dibentuknya Lembaga Masyarakat Desa Hutan di Indonesia muncul pada era Reformasi. Dalam era Reformasi muncul wacana pengelolaan hutan bersama masyarakat, karena di jaman Reformasi terjadi kebebasan hak bagi seluruh lapisan masyarakat. Masyarakat mulai bertindak seenaknya sendiri tanpa memperhitungkan benar salahnya. Kondisi tersebut juga terjadi pada kawasan hutan negara yang dikelola oleh BUMN (Perum Perhutani) di seluruh wilayah Jawa (khususnya) dan seluruh Indonesia (pada umumnya), terjadi pengrusakan hutan dengan cara menjarah kayu-kayu hutan atau sering disebut *illegal logging* untuk kepentingan sebagian masyarakat. Atas dasar itu akhirnya hutan menjadi rusak, maka pemerintah membuat strategi melalui Perum Perhutani dengan mencetuskan program Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat (PHBM), dimana masyarakat dilibatkan untuk mengelola hutan agar hutan dapat menghasilkan baik secara *hidrologis, ekonomi, sosial* serta dilakukan dengan sistem hutan lestari.

Bersama digulirkannya program PHBM oleh Pemerintah melalui UU No. 41/1999 tentang kehutanan dan Perda yang digulirkan Gubernur Jawa Tengah No. 24/2001, maka pengelolaan hutan negara dikerjasamakan dengan masyarakat desa-desa di pinggiran hutan khususnya di pulau Jawa. Tidak lepas dari program tersebut, maka Desa Sambak, Kecamatan Kajoran, Kabupaten Magelang juga terlibat untuk mengelola hutan bersama masyarakat yang di bentuk melalui kerjasama PHBM antara Perhutani dengan masyarakat Desa Sambak sehingga lahirlah kelompok masyarakat

yang mengelola hutan dengan nama LMDH Wana Hijau Lestari. Tugas LMDH Wana Hijau Lestari adalah mengelola hutan untuk bisa menghasilkan secara Ekonomi maupun Ekologis Sosial untuk kepentingan masyarakat serta hutan tetap lestari, sedangkan kewajibannya adalah menjaga hutan agar tetap terjaga dari pengrusakan-pengrusakan hutan yang tidak bertanggung jawab.

LMDH Wana Hijau Lestari berdiri atas dasar Akta Notaris Gregorius Ivo Marius Eliyasar S.H No 07/27 Agustus 2003 serta akta kerjasama dengan Perhutani, dengan hak dan kewajiban diatur dalam kesepakatan bersama. Setelah berdiri, LMDH Wana Hijau Lestari menata lahan hutan negara seluas 96,4 Ha dengan memetak-metak lahan dikerjasamakan antara pengurus dengan petani hutan menjadi 254 petak yang tiap 1 petak dikelola oleh 1 petani hutan. Perjalanan selanjutnya, dari pemetakan itu petani dapat hak mendapatkan rumput tanaman hijauan untuk kebutuhan ternak mereka. Sedangkan kewajibannya mengamankan petak lahan dari pengrusak yang tak bertanggung jawab. Hutan negara wilayah Sambak berada di pangkuan petak Perhutani pada petak 7B dan 7E, sedangkan tanaman kayu yang ada di wilayah ini adalah tanaman hutan heterogen berupa tanaman mahoni, pinus, damar dan kayu-kayuan lainnya yang di tanam pada tahun 1962 sampai sekarang masih utuh asli dan lestari, sedangkan hutan ini adalah hutan produksi terbatas.

Perkembangan selanjutnya, LMDH Wana Hijau Lestari mengembangkan tanaman di bawah tegakan dan belajar dari stakeholder yang ada mulai tahun 2008 tentang penanaman kopi di bawah tegakan. Program ini dituangkan dalam program

kerja 5 tahunan LMDH Wana Hijau Lestari. Demikian sejarah singkat LMDH Wana Hijau Lestari Desa Sambak yang beralamat di jalan kaliabu kajoran km 2,5 kode pos 56163.

a. Visi dan Misi

Visi

Aktif dalam pemberdayaan masyarakat, pembangunan desa dan pelestarian sumber daya hutan dengan semangat kebersamaan yang mandiri

Misi

- Mendorong meningkatnya sumber daya manusia msyarakat desa hutan
- Mendorong terciptanya pembangunan desa secara merata
- Mendorong terciptanya semangat kebersamaan dalam melestarikan hutan
- Mendorong terwujudnya LMDH Wana Hijau Lestari yang mandiri

b. Struktur Organisasi

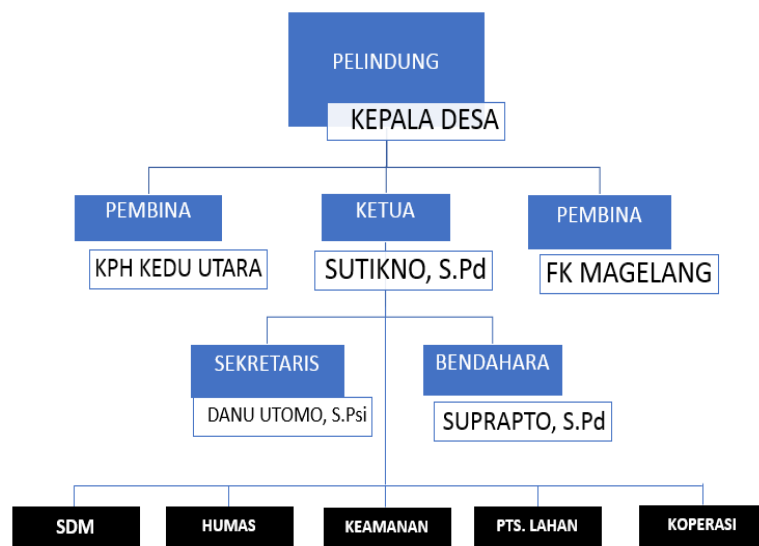
Struktur organisasi LMDH Wana Hijau Lestari adalah sebagai berikut:

- a. Pelindung (Kepala Desa)
- b. Pembina (Perum Perhutani KPH Kedu Utara)
- c. Pembina (Forum Komunikasi Kab. Magelang)
- d. Ketua (Sutikno, S.Pd)
- e. Sekretaris (Danu Utomo, S.Psi)
- f. Bendahara (Suprpto, S.Pd)

- g. Seksi SDM (Nurul Ikhsan S S.Pd & Kismiyati)
- h. Seksi Humas (Suryadi & Jumiyanto)
- i. Seksi Keamanan (Makpul & A.Supriyadi)
- j. Seksi Potensi Lahan (Madarin & N. Amri)
- k. Seksi Koperasi (Asnap & Mukoyin)

Gambar 2.5

Struktur Organisasi LMDH “Wana Hijau Lestari”



Sumber : LMDH Wana Hijau Lestari

Pelaksanaan PHBM di LMDH Wana Hijau Lestari secara umum meliputi 4

Program pokok , yakni :

1. Program yang berkaitan dengan upaya mendorong gerakan menuju cara pikir Hutan untuk keberlanjutan Kehidupan.
2. Program untuk mendukung gerakan pemberdayaan Masyarakat Desa Hutan.

3. Program untuk mendukung proses penguatandan pengembangan kelembagaan.
4. Program untuk mendukung gerakan pembangunan Desa Hutan.

Program pokok diatas secara garis besar dibagi dalam program strategis yaitu :

1. Studi Kolaboratif

Program yang bertujuan peningkatan kualitas SDM pengurus, anggota dan relawan LMDH sehingga terwujud keterampilan dan kemampuan untuk pengembangan LMDH.

2. Dialog Kebijakan

Program yang bertujuan mengkomunikasikan kepentingan pelestarian sumber daya hutan pada level kebijakan di semua tingkatan.

3. Kampanye Hutan untuk keberlanjutan Kehidupan

Program penumbuhan cara berfikir “ Forest is a part of our life “ agar masyarakat faham akan pelestarian hutan merupakan kebutuhan bagi setiap masyarakat desa hutan.

4. Membangun Desa

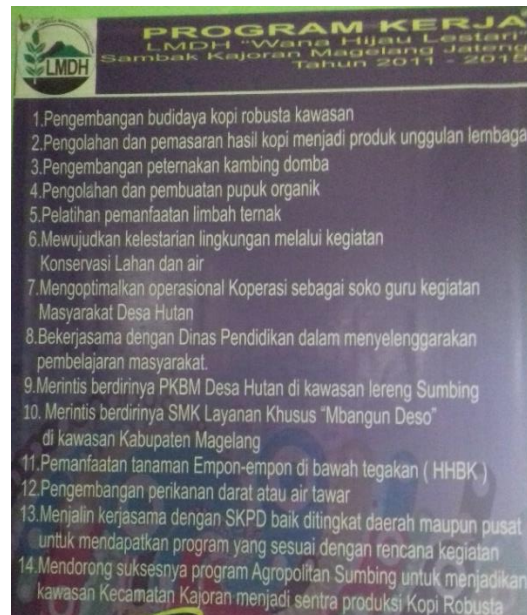
Program yang bertujuan untuk membangun desa berdasarkan potensi wilayah desa hutan.

5. LMDH Mandiri

Program yang mendukung upaya penguatan dan pengembangan LMDH melalui perencanaan strategis yang partisipatif dan aplikatif.

Gambar 2.6

Program Kerja LMDH Wana Hijau Lestari 2011-2015



Sumber : Dokumentasi Pribadi

Gambar 2.7

Program Kerja LMDH Wana Hijau Lestari 2016-2020



Sumber : Dokumentasi Pribadi